

Perkembangan Demokrasi di Amerika Serikat: Dari Revolusi hingga Era Modern

The Development of Democracy in the United States: From the Revolution to the Modern Era

Sheila Ananda Putri*, Jurusan Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Fivie Safitri, Jurusan Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Indah Chofifah SM, Jurusan Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Risky Dwi Ananda, Jurusan Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Bagas Ibnu Andira, Jurusan Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Deveronika Zalukhu, Jurusan Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Diraningsih Zai, Jurusan Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Medan, Indonesia

ABSTRACT

This article examines the development of democracy in the United States from the American Revolution to the modern era, focusing on institutional, social, and political transformations over more than two centuries. Beginning with the Declaration of Independence and the creation of the Constitution, it explains how democratic principles were established and tested through challenges such as the Civil War, the civil rights movement, and economic and technological changes. Through historical and critical analysis, the article explores the evolution of voting rights, public participation, and power dynamics at federal and state levels. Additionally, it highlights the role of individuals and groups in shaping democratic structures and the impact of domestic and international policies on American democracy. The findings show significant progress, but ongoing challenges to democratic principles include political polarization, economic inequality, and threats to civil rights. In conclusion, the article emphasizes understanding the history of American democracy to address contemporary challenges and strengthen commitment to democratic values.

ARTICLE HISTORY

Received 22/05/2024

Revised 21/06/2024

Accepted 22/06/2024

Published 25/06/2024

KEYWORDS

Democracy; United States; American revolution.

*CORRESPONDENCE AUTHOR

✉ putrishellaananda@gmail.com

PENDAHULUAN

Demokrasi Amerika Serikat merupakan hasil dari perjalanan panjang yang penuh dengan perjuangan, konflik, dan transformasi yang signifikan. Sejak Revolusi Amerika pada akhir abad ke-18 M, yang menandai kemerdekaan negara tersebut dari kekuasaan kolonial Inggris, konsep dan praktik demokrasi terus berkembang dan mengalami banyak transformasi (Alfonso, [2023](#); Arisandi, [2015](#)). Perkembangan ini tidak hanya dibentuk oleh peristiwa-peristiwa besar seperti penyusunan Deklarasi Kemerdekaan dan Konstitusi, tetapi juga oleh dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks (Djuyandi, [2023](#)).

Pada masa awal pembentukannya, demokrasi Amerika lebih merupakan sebuah eksperimen yang tidak pernah dijalankan sebelumnya dalam skala besar (Adams, [2001](#); Korotayev et al., [2024](#)). Para pendiri bangsa menghadapi tantangan besar dalam merancang sebuah sistem pemerintahan yang mampu menyeimbangkan antara kekuasaan negara dan hak-hak individu (Hikam, [2000](#)). Konstitusi Amerika Serikat, yang disahkan pada tahun 1787, menjadi dokumen fundamental yang mengatur prinsip-prinsip dasar pemerintahan dan hak-hak warga negara (Shalev, [2008](#)). Namun, penerapannya menghadapi banyak ujian, terutama terkait dengan isu-isu seperti perbudakan, hak-hak minoritas, dan perluasan hak pilih (Latief et al., [2019](#)).

Perjalanan demokrasi Amerika Serikat selanjutnya ditandai oleh serangkaian perubahan konstitusional dan gerakan sosial yang berusaha untuk memperluas partisipasi politik dan menjamin hak-hak sipil bagi semua warga negara (Boix, [2011](#); He, [2022](#)). Perang Saudara Amerika (1861-1865) dan gerakan hak sipil pada abad ke-20 M adalah dua contoh penting dari perjuangan untuk mewujudkan cita-cita demokrasi yang lebih inklusif (Deni et al., [2024](#); Hobson, [2008](#)). Meskipun demikian, setiap kemajuan selalu diikuti oleh tantangan baru, seperti polarisasi politik, ketimpangan ekonomi, dan ancaman terhadap hak-hak sipil, yang terus menguji kekuatan dan ketahanan sistem demokrasi di Amerika Serikat (Winarno, [2014](#)). Pada era modern, demokrasi Amerika terus menghadapi tantangan dari dalam dan luar negeri. Globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan demografis telah mengubah cara

warga negara berinteraksi dengan pemerintah dan satu sama lain. Selain itu, munculnya gerakan populis dan meningkatnya polarisasi politik menambah kompleksitas dalam menjaga stabilitas demokratis (Zein & Septiani, [2023](#)).

Demokrasi di Amerika Serikat merupakan hasil dari perjalanan panjang dan dinamis yang mencakup beragam perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Sejak proklamasi kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1776, negara ini telah berupaya membangun sebuah sistem pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokratis (Minderop, [2006](#)). Perjalanan ini dimulai dengan penyusunan Deklarasi Kemerdekaan dan Konstitusi Amerika Serikat, yang menetapkan kerangka kerja dasar bagi pemerintahan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan menjamin kebebasan politik.

Awalnya, demokrasi di Amerika Serikat menghadapi berbagai tantangan signifikan. Meskipun Konstitusi menjanjikan kebebasan dan hak yang setara, kenyataannya, banyak kelompok, termasuk wanita, orang kulit hitam, dan penduduk asli Amerika, tidak menikmati hak-hak tersebut (Machan, [2006](#)). Perbudakan tetap menjadi isu kontroversial hingga Perang Saudara pada pertengahan abad ke-19, yang mengarah pada penghapusan perbudakan namun juga meninggalkan warisan diskriminasi rasial yang bertahan hingga abad ke-20 M dan seterusnya.

Pada abad ke-20 M, perjuangan untuk hak-hak sipil menjadi sorotan utama. Gerakan hak sipil, yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Martin Luther King Jr., berjuang untuk mengakhiri segregasi dan diskriminasi rasial, serta memperluas hak pilih kepada semua warga negara tanpa memandang ras. Gerakan ini menghasilkan perubahan legislatif penting, seperti *Civil Rights Act* 1964 dan *Voting Rights Act* 1965, yang memperkuat komitmen Amerika terhadap prinsip-prinsip demokrasi inklusif (Yulianto, [2021](#)). Era modern membawa tantangan baru bagi demokrasi Amerika. Globalisasi, digitalisasi, dan kemajuan teknologi informasi telah mengubah cara orang berkomunikasi dan berpartisipasi dalam proses politik. Sementara itu, ketimpangan ekonomi dan polarisasi politik meningkat, mengancam kohesi sosial dan stabilitas politik. Munculnya gerakan populis di berbagai belahan dunia, termasuk Amerika Serikat, menunjukkan adanya ketidakpuasan yang mendalam di antara sebagian populasi terhadap status *quo* politik dan ekonomi.

Studi ini bertujuan untuk menelusuri perkembangan demokrasi di Amerika Serikat dari Revolusi Amerika hingga era modern, dengan menyoroti perubahan institusional, sosial, dan politik yang signifikan. Dengan mengeksplorasi sejarah panjang ini, kita dapat memahami bagaimana demokrasi Amerika telah berevolusi, menghadapi berbagai tantangan, dan terus beradaptasi dengan kondisi yang berubah. Pemahaman ini penting untuk mengenali tantangan kontemporer yang dihadapi demokrasi Amerika dan menemukan cara untuk memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi di masa depan. Dalam konteks global yang semakin kompleks, studi ini juga menyoroti pentingnya demokrasi Amerika sebagai model dan inspirasi bagi negara-negara lain yang sedang berjuang untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan inklusif. Dengan belajar dari pengalaman Amerika, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk memperkuat demokrasi di seluruh dunia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis dan analisis kualitatif untuk menyelidiki perkembangan demokrasi di Amerika Serikat sejak masa Revolusi hingga saat ini (Adlini et al., [2022](#)). Metode penelitian ini dipilih untuk memahami perubahan institusional, sosial, dan politik yang rumit dan beragam yang telah membentuk demokrasi Amerika Serikat selama lebih dari dua abad. Di bawah ini adalah tahapan utama dari metode penelitian ini.

Penelitian ini sebagian besar mengandalkan data sekunder, yang meliputi buku-buku sejarah, artikel jurnal akademis, dokumen resmi, dan sumber arsip lainnya. Sumber-sumber ini mencakup berbagai literatur tentang sejarah politik, hukum, dan sosial Amerika Serikat, serta studi kasus tentang peristiwa-peristiwa penting seperti penyusunan Konstitusi, Perang Saudara, dan gerakan hak-hak sipil. Proses analisis ini melibatkan pemeriksaan dokumen-dokumen historis yang relevan, termasuk teks asli Deklarasi Kemerdekaan, Konstitusi Amerika Serikat, amandemen konstitusi, dan undang-undang hak-hak sipil. Selain itu, analisis juga mencakup pidato, surat, dan tulisan dari tokoh-tokoh penting dalam sejarah demokrasi Amerika Serikat, seperti George Washington, Abraham Lincoln, dan Martin Luther King Jr (Ismayani, [2019](#)).

Penelitian ini menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi dan mengategorikan tema-tema utama yang muncul dari analisis dokumentasi. Topik-topik yang tercakup di dalamnya adalah hak pilih, partisipasi publik, polarisasi politik, dan peran gerakan sosial. Pendekatan ini membantu dalam memahami bagaimana isu-isu ini

berkembang dan berdampak pada demokrasi Amerika sepanjang waktu. Studi kasus digunakan untuk menganalisis peristiwa-peristiwa penting yang memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan demokrasi di Amerika Serikat. Beberapa kasus yang diteliti dalam penelitian ini meliputi proses resmi pengesahan Konstitusi, penghapusan praktik perbudakan setelah Perang Saudara, dan pergerakan untuk memperjuangkan hak-hak sipil pada abad ke-20 M. Studi kasus ini memungkinkan para peneliti untuk menggali lebih dalam dinamika spesifik yang mempengaruhi perubahan struktur dan praktik demokrasi.

PEMBAHASAN

Perkembangan demokrasi di Amerika Serikat adalah sebuah narasi kompleks yang mencakup perubahan-perubahan signifikan dalam struktur politik, sosial, dan ekonomi selama lebih dari dua abad. Demokrasi Amerika, yang dimulai dengan deklarasi kemerdekaan dari kekuasaan kolonial Inggris, telah melalui berbagai fase transformasi, diwarnai oleh perjuangan untuk kebebasan, kesetaraan, dan partisipasi politik yang lebih luas.

Pada awal pembentukannya, Amerika Serikat adalah sebuah eksperimen politik yang berani. Deklarasi Kemerdekaan tahun 1776 dan penyusunan Konstitusi pada tahun 1787 mencerminkan aspirasi tinggi para pendiri bangsa untuk menciptakan sebuah pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokratis. Namun, pada saat yang sama, konsep demokrasi yang diusung masih terbatas pada sekelompok kecil warga negara, yaitu laki-laki kulit putih yang memiliki properti. Tantangan pertama terhadap demokrasi Amerika muncul dari ketegangan antara idealisme kemerdekaan dan realitas praktik perbudakan, yang menimbulkan konflik moral dan politik yang mendalam.

Perang Saudara Amerika (1861-1865) menjadi titik balik yang penting dalam sejarah demokrasi Amerika. Konflik ini tidak hanya menyelesaikan isu perbudakan secara hukum melalui Amendemen Ketiga Belas, tetapi juga menguji kekuatan persatuan nasional dan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Meskipun perbudakan dihapuskan, masa Rekonstruksi yang mengikuti perang ini diwarnai oleh upaya untuk menyempurnakan hak-hak sipil bagi bekas budak, yang sering kali dihadapi dengan resistensi keras dari berbagai pihak.

Perkembangan demokrasi Amerika di abad ke-20 terutama ditandai oleh perjuangan untuk memperluas hak pilih dan partisipasi politik bagi berbagai kelompok yang sebelumnya termarginalkan. Gerakan hak sipil pada tahun 1950-an dan 1960-an, dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Martin Luther King Jr., berhasil menggalang dukungan luas untuk mengakhiri segregasi rasial dan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan. Pengesahan *Civil Rights Act* 1964 dan *Voting Rights Act* 1965 menjadi tonggak penting yang memastikan hak-hak sipil dan politik yang lebih setara bagi semua warga negara.

Pada era modern, demokrasi Amerika menghadapi tantangan baru yang dipicu oleh globalisasi, teknologi informasi, dan perubahan demografis. Kemajuan teknologi, khususnya dalam komunikasi dan media sosial, telah mengubah cara warga negara berinteraksi dengan pemerintah dan berpartisipasi dalam proses politik. Meskipun teknologi menawarkan peluang untuk partisipasi yang lebih luas, ia juga membawa risiko seperti penyebaran informasi yang salah dan polarisasi opini publik.

Selain itu, ketimpangan ekonomi yang semakin lebar telah menimbulkan ketidakpuasan yang mendalam di antara sebagian populasi, yang merasa tertinggal oleh sistem politik dan ekonomi. Polarisasi politik yang meningkat, ditambah dengan munculnya gerakan populis, mengancam stabilitas dan kohesi sosial. Tantangan ini memerlukan adaptasi dan reformasi dalam sistem demokrasi untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar seperti kebebasan, kesetaraan, dan keadilan tetap terjaga. Demokrasi di Amerika Serikat adalah sebuah entitas yang hidup dan terus berkembang. Dari periode awal hingga era modern, perubahan-perubahan signifikan telah terjadi melalui perjuangan dan reformasi yang sering kali memerlukan pengorbanan besar. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, perjalanan demokrasi Amerika juga dipenuhi dengan pencapaian yang mengesankan dalam memperluas hak dan partisipasi politik.

Untuk masa depan, penting bagi Amerika Serikat untuk terus mengevaluasi dan menyesuaikan sistem politiknya agar mampu menghadapi tantangan kontemporer. Upaya untuk memperkuat pendidikan kewarganegaraan, mengatasi ketimpangan ekonomi, dan memitigasi polarisasi politik sangat penting untuk memastikan bahwa demokrasi Amerika tetap relevan dan kuat. Dengan mempelajari sejarah panjang dan kompleks ini, kita dapat menemukan inspirasi dan pelajaran berharga untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi demokrasi di Amerika Serikat dan di seluruh dunia.

Perkembangan demokrasi di Amerika Serikat mencerminkan perjalanan yang penuh dengan dinamika dan tantangan. Dari Revolusi Amerika hingga era modern, perubahan yang terjadi telah membentuk dan mendefinisikan ulang arti demokrasi dalam konteks Amerika Serikat. Pembahasan ini akan mengeksplorasi lebih dalam mengenai berbagai fase penting dalam sejarah demokrasi Amerika, serta tantangan dan peluang yang muncul di setiap fase.

Setelah memenangkan kemerdekaan dari Inggris, para pendiri bangsa menghadapi tugas berat untuk membentuk sebuah pemerintahan yang mampu menyeimbangkan kekuasaan antara negara dan hak-hak individu. Konstitusi Amerika Serikat, yang disahkan pada tahun 1787, menjadi landasan utama bagi pemerintahan demokratis. Konstitusi ini memperkenalkan sistem *checks and balances* yang bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dan menjamin kebebasan politik. Namun, pada masa awal ini, hak pilih sangat terbatas. Hanya laki-laki kulit putih yang memiliki properti yang diizinkan untuk memilih, sementara wanita, orang kulit hitam, dan penduduk asli Amerika dikecualikan dari proses politik. Keterbatasan ini mencerminkan ketegangan antara prinsip-prinsip demokratis dan praktik eksklusif yang ada pada saat itu.

Perang Saudara Amerika (1861-1865) merupakan salah satu periode paling krusial dalam sejarah demokrasi Amerika. Konflik ini menggarisbawahi perbedaan mendasar antara negara bagian Utara dan Selatan mengenai isu perbudakan dan hak-hak negara. Kemenangan Union (Utara) tidak hanya mengakhiri perbudakan melalui Amandemen Ketiga Belas, tetapi juga membawa perubahan konstitusional yang signifikan dengan pengesahan Amandemen Keempat Belas dan Kelima Belas yang menjamin hak-hak sipil dan hak pilih bagi pria kulit hitam. Meskipun demikian, masa Rekonstruksi pasca perang diwarnai oleh resistensi dan kekerasan, terutama di negara bagian Selatan, yang berusaha untuk mempertahankan sistem diskriminatif melalui Jim Crow Laws. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan legal, penerapan prinsip-prinsip demokratis sering kali terhalang oleh praktik sosial yang diskriminatif.

Abad ke-20 menandai periode penting lainnya dengan munculnya gerakan hak sipil yang berjuang untuk mengakhiri segregasi rasial dan diskriminasi. Tokoh-tokoh seperti Martin Luther King Jr. dan organisasi seperti NAACP memainkan peran kunci dalam menggalang dukungan publik dan mendorong perubahan legislatif. Pengesahan *Civil Rights Act* 1964 dan *Voting Rights Act* 1965 merupakan tonggak sejarah yang memperluas hak-hak sipil dan hak pilih kepada semua warga negara tanpa memandang ras. Selain itu, gerakan hak wanita juga mengalami kemajuan signifikan dengan pengesahan *Nineteenth Amendment* pada tahun 1920 yang memberikan hak pilih kepada wanita. Ini menunjukkan bahwa demokrasi Amerika terus berkembang menuju inklusivitas yang lebih besar, meskipun perjuangan untuk kesetaraan penuh masih berlangsung.

Pada era modern, demokrasi Amerika menghadapi tantangan baru yang kompleks. Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi telah mengubah lanskap politik dan sosial. Media sosial, misalnya, telah menjadi alat penting untuk mobilisasi politik tetapi juga membawa tantangan seperti penyebaran disinformasi dan polarisasi opini publik. Selain itu, ketimpangan ekonomi yang semakin besar dan polarisasi politik yang meningkat telah menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap institusi demokratis. Munculnya gerakan populis di berbagai belahan dunia, termasuk Amerika Serikat, mencerminkan keresahan yang mendalam di antara sebagian populasi terhadap status *quo* politik dan ekonomi.

Masa depan demokrasi di Amerika Serikat bergantung pada kemampuan negara ini untuk beradaptasi dengan tantangan kontemporer. Reformasi dalam sistem politik, peningkatan pendidikan kewarganegaraan, dan upaya untuk mengatasi ketimpangan ekonomi adalah langkah-langkah penting untuk memperkuat demokrasi. Selain itu, penting bagi Amerika Serikat untuk tetap berkomitmen pada prinsip-prinsip dasar demokrasi seperti kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Amerika Serikat dapat terus memperbaiki dan memperkuat sistem demokrasinya. Ini tidak hanya penting untuk stabilitas dan kesejahteraan dalam negeri, tetapi juga memberikan inspirasi bagi negara-negara lain yang berusaha untuk membangun dan mempertahankan demokrasi. Melalui komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan adaptasi yang terus-menerus terhadap perubahan, Amerika Serikat dapat menghadapi masa depan dengan optimisme dan ketahanan.

SIMPULAN

Perkembangan demokrasi di Amerika Serikat merupakan sebuah perjalanan panjang yang diwarnai dengan berbagai tantangan dan kemajuan yang signifikan sejak masa Revolusi hingga saat ini. Awalnya, demokrasi Amerika didirikan berdasarkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Deklarasi Kemerdekaan dan Konstitusi, meskipun penerapannya masih terbatas dan eksklusif. Perang Saudara dan amandemen konstitusi yang terjadi setelahnya membawa

perubahan yang signifikan, terutama dalam hal penghapusan perbudakan dan perluasan hak-hak sipil. Abad ke-20 menyaksikan lebih banyak kemajuan dengan gerakan hak-hak sipil dan perluasan hak pilih, yang bertujuan untuk mencapai demokrasi yang lebih inklusif dan setara. Pemberlakuan undang-undang yang signifikan seperti Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964 dan Undang-Undang Hak Pilih tahun 1965 mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip-prinsip demokrasi, meskipun perjuangan untuk mencapai kesetaraan penuh masih terus berlanjut.

Pada masa modern, tantangan-tantangan baru seperti globalisasi, teknologi informasi, kesenjangan ekonomi, dan polarisasi politik menguji ketahanan demokrasi Amerika. Namun, sejarah menunjukkan bahwa demokrasi Amerika memiliki kapasitas untuk beradaptasi dan berkembang melalui reformasi dan partisipasi aktif masyarakat. Kesimpulannya, demokrasi di Amerika Serikat telah mengalami transformasi yang signifikan sejak berdirinya, beradaptasi dengan berbagai tantangan dan perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Untuk menghadapi masa depan, sangat penting bagi Amerika Serikat untuk secara konsisten memperkuat komitmennya terhadap nilai-nilai demokrasi, melakukan reformasi yang diperlukan, dan meningkatkan partisipasi politik yang inklusif. Melalui pembelajaran dari sejarah yang melimpah, Amerika Serikat dapat terus menjadi contoh demokrasi yang tangguh dan efektif di masa mendatang.

REFERENSI

- Adams, W. P. (2001). American Revolution, The. In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences* (pp. 430–434). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B0-08-043076-7/02687-5>
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Alfonso, K. (2023). Democracy in the United States: An Analysis of its Evolution and Challenges. *International Journal of Science and Society*, 5(4), 321–329. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v5i4.789>
- Arisandi, H. (2015). *Buku Pintar Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi Dari Klasik Sampai Modern: Biografi, Gagasan, Dan Pengaruh Terhadap Dunia*. IRCiSoD.
- Boix, C. (2011). Democracy, Development, and the International System. *American Political Science Review*, 105(4), 809–828. <https://doi.org/10.1017/S0003055411000402>
- Deni, H. A., MM, C. Q. M., Asiyah, S. A., Sopian, S. H., Waruwu, Y., Funco Tanipu, S. T., Louisa Yesami, K., SH, M. H., Amane, A. P. O., & Sos, S. (2024). *Pengantar Ilmu Politik*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Djuyandi, Y. (2023). *Pengantar Ilmu Politik*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- He, J. (2022). The Patterns of Democracy in Context of Historical Political Science. *Chinese Political Science Review*, 7(1), 111–139. <https://doi.org/10.1007/s41111-021-00201-5>
- Hikam, M. A. S. (2000). *Islam, demokratisasi, dan pemberdayaan civil society*. Erlangga.
- Hobson, C. (2008). Revolution, Representation and the Foundations of Modern Democracy. *European Journal of Political Theory*, 7(4), 449–471. <https://doi.org/10.1177/1474885108094055>
- Ismayani, A. (2019). *Metodologi penelitian*. Syiah Kuala University Press.
- Korotayev, A., Zhdanov, A., Grinin, L., & Ustyuzhanin, V. (2024). Revolution and Democracy in the Twenty-First Century. *Cross-Cultural Research*. <https://doi.org/10.1177/10693971241245862>
- Latief, A., Ahmad Al Yakin, S. A., & Ahmad, H. (2019). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Machan, T. R. (2006). *Kebebasan dan Kebudayaan: Gagasan tentang Masyarakat Bebas*. Yayasan Obor Indonesia.
- Minderop, A. (2006). *Pragmatisme: sikap hidup dan prinsip politik luar negeri Amerika*. Yayasan Obor Indonesia.
- Shalev, E. (2008). The missing revolution: The totalitarian democracy in light of 1776. *History of European Ideas*, 34(2), 158–168. <https://doi.org/10.1016/j.histeuroideas.2007.12.004>
- Winarno, B. (2014). *Dinamika isu-isu global kontemporer*. CAPS.
- Yulianto, D. (2021). *Bijak ala dalai lama, berani ala nelson mandela*. Laksana.
- Zein, M. H. M., & Septiani, S. (2023). *Ilmu Administrasi Negara*. Sada Kurnia Pustaka.